



---

## **Peran Citizen Reporter dalam Mendorong Partisipasi Publik melalui Media Sosial: Perspektif Administrasi Publik Partisipatif**

---

<b><u>INFO PENULIS</u></b>	<b><u>INFO ARTIKEL</u></b>
Hardiyanti Universitas Negeri Manado <a href="mailto:Hardiyanti@unima.ac.id">Hardiyanti@unima.ac.id</a> +6281340537020	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Hardiyanti. (2025). Peran Citizen Reporter dalam Mendorong Partisipasi Publik melalui Media Sosial: Perspektif Administrasi Publik Partisipatif. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 4634-4640.

### **Abstrak**

Makalah ini membahas fenomena citizen reporter sebagai bentuk partisipasi politik alternatif warga negara dalam ruang digital, khususnya melalui media sosial. Dalam konteks administrasi publik partisipatif, peran warga dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi politik menunjukkan pergeseran cara masyarakat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan menggunakan metode studi literatur, makalah ini menelaah keterjangkauan teknologi, arsitektur platform media sosial, serta kontribusinya dalam membentuk ruang diskursif alternatif. Temuan menunjukkan bahwa citizen reporter tidak hanya memperluas akses terhadap informasi politik, tetapi juga membuka ruang partisipatif bagi kelompok marginal yang selama ini tereksklusi dari media arus utama. Media sosial seperti Twitter dan Facebook menjadi medium penting dalam menyalurkan ekspresi politik warga, serta mengikis hierarki penjaga gerbang informasi. Dengan menelaah peran citizen reporter dari sudut pandang jurnalisme alternatif, makalah ini menekankan pentingnya memandang partisipasi digital sebagai bentuk baru keterlibatan warga dalam tata kelola publik. Hasil kajian ini memperkuat argumen bahwa platform digital tidak sekadar sebagai alat komunikasi, tetapi telah menjadi infrastruktur sosial-politik yang memungkinkan demokratisasi informasi dan pelembagaan ruang partisipatif warga.

**Kata Kunci:** citizen reporter, partisipasi politik, media sosial, administrasi publik, jurnalisme alternative.

### Abstract

This paper examines the phenomenon of citizen reporters as a form of alternative political participation in the digital space, particularly through social media platforms. Within the framework of participatory public administration, the role of citizens in producing and distributing political information reflects a shift in how the public engages in democratic processes. Employing a literature review method, this study explores technological affordances, platform architectures, and their contribution to shaping alternative discursive spaces. The findings indicate that citizen reporters not only broaden access to political information but also provide participatory opportunities for marginalized groups excluded from mainstream media. Social media platforms such as Twitter and Facebook serve as crucial channels for civic expression and reduce gatekeeping hierarchies in information dissemination. By analyzing the role of citizen reporters through the lens of alternative journalism, this paper emphasizes the need to understand digital participation as a novel form of citizen engagement in public governance. The study supports the argument that digital platforms are not merely communication tools but have become socio-political infrastructures that enable the democratization of information and the institutionalization of participatory public spaces.

**Key Words:** citizen reporter, political participation, social media, public administration, alternative journalism

### A. Pendahuluan

Platform media sosial telah menjadi arena penting bagi partisipasi masyarakat dan politik. Hal ini merupakan alat utama dalam kampanye pemilu, aksi protes, dan pembentukan kelompok sukarela, serta dapat membantu membentuk dan mendorong perilaku masyarakat yang inklusif, serta memperkuat partisipasi di kalangan generasi muda dan kelompok yang tidak terlibat (Jungherr et al., 2019). Mereka juga merupakan sarana aliran propaganda dan disinformasi, serta tersangka utama meningkatnya tingkat polarisasi yang terjadi di masyarakat Barat, yang semuanya dapat memainkan peran penting dalam memobilisasi dan mendemobilisasi masyarakat (Borbáth, 2021). Menawarkan berbagai Dengan keterjangkauan dan metode distribusi konten, platform dapat mengakomodasi teks, gambar, dan materi audio visual yang dapat digunakan untuk mendorong masyarakat terlibat dalam politik (Rahman et al., 2022). Jika kualitas kehidupan politik bergantung pada kualitas partisipasi politik, maka memahami bagaimana platform media sosial sesuai dan tidak sesuai dengan pemahaman klasik kita tentang partisipasi adalah penting untuk memahami keterlibatan demokrasi kontemporer.

Salah satu kendala dalam memahami partisipasi yang terkait dengan media sosial adalah masalah heterogenitas antar platform media sosial. Dengan keterjangkauan dan metode distribusi konten, platform dapat mengakomodasi teks, gambar, dan materi audio visual yang dapat digunakan untuk mendorong masyarakat terlibat dalam politik (Rahman et al., 2022). Jika kualitas kehidupan politik bergantung pada kualitas partisipasi politik, maka memahami bagaimana platform media sosial sesuai dan tidak sesuai dengan pemahaman klasik kita tentang partisipasi adalah penting untuk memahami keterlibatan demokrasi kontemporer.

Dalam literatur, penekanan lebih banyak diberikan pada mempelajari platform media sosial sebagai sebuah kelompok dibandingkan membedakannya, meskipun faktanya kemampuan platform dalam kaitannya dengan perilaku politik sangat bervariasi (Gorwa, 2019). Temuan utama dari penelitian empiris sebelumnya adalah bahwa penggunaan internet melengkapi bentuk partisipasi tradisional (Choi & Song, 2020). Temuan ini menyiratkan bahwa penggunaan media sosial secara politik dapat dipahami dengan baik dalam kaitannya dengan kategori klasik perilaku politik. Kami menduga ada lebih banyak hal yang perlu dibahas, sebagian karena perbedaan antar platform. Dalam tinjauan sistematis terhadap 300 studi tentang partisipasi politik online, (Tai et al., 2020) menemukan bahwa platform jarang dipertimbangkan dalam mengukur partisipasi. Hal ini menyisakan pertanyaan empiris yang belum terjawab mengenai kekuatan hasil di seluruh platform media sosial, dan yang lebih penting, hal ini membuka pertanyaan yang lebih besar mengenai apakah tindakan politik yang dilakukan secara online sebaiknya dipahami sebagai variasi dari bentuk partisipasi yang ada, atau apakah tindakan tersebut harus dipahami sebagai sesuatu yang berbeda.

## B. Metodologi

Artikel ini menggunakan metode studi literatur. Melakukan penelusuran terhadap beberapa artikel baik yang terbit di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Model penelusuran artikel dilakukan dengan mencari beberapa kata kunci yang relevan dengan makalah. Ada beberapa kata kunci yang menjadi patokan dalam Menyusun makalah ini, beberapa diantaranya adalah citizen reporter, partisipasi politik media sosial, dan media sosial baru. Ketiga kata kunci ini yang digunakan secara bergantian, untuk menelusuri dan mencari beberapa artikel. Hasilnya adalah, puluhan artikel baik di jurnal nasional maupun internasional yang telah mempublikasi dengan kata kunci tersebut. Selanjut, sebagai penulis menelaah dan menyortir beberapa artikel yang relevan dengan tema yang akan dibahas pada makalah ini. Pembahasan makalah sepenuhnya mengandalkan analisis subyektif penulis. Dengan data primer berupa artikel di jurnal nasional dan internasional.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Keterjangkauan dan Partisipasi Media Sosial

Literatur mengenai partisipasi politik online belum menjawab permasalahan klasifikasi ini secara memuaskan. Merupakan praktik yang umum untuk menyamakan perilaku online dengan perilaku offline. Salah satu masalah dengan pendekatan tersebut adalah bahwa alat media digital telah berubah secara dramatis dalam 20 tahun terakhir, terutama dalam transisi dari alat generasi pertama yang berpusat pada email, Web, dan blog ke alat Web 2.0 generasi kedua yang berpusat pada jejaring sosial. situs, mikroblog, dan situs berbagi video yang masih terus berkembang penggunaannya (Chayinska et al., 2021). Dalam studi awal yang penting mengenai masalah ini, (Chayinska et al., 2021) menemukan bahwa berbagai aktivitas online dan offline dikelompokkan bersama dalam analisis faktor dan mereka menyimpulkan bahwa partisipasi online sebagai konstruksi teoritis terlalu sempit.

Kajian yang paling berpengaruh terhadap masalah ini adalah kajian (Arshad & Khurram, 2020) yang sampai pada kesimpulan serupa. Beberapa tindakan politik online, seperti menandatangani petisi online, berkelompok dengan tindakan politik offline. Implikasinya, petisi adalah mengajukan petisi apapun media yang digunakan. Tindakan-tindakan lain, menurut mereka, berbeda dan mencerminkan kualitas lebih aktif, kolektif, dan berjejaring yang mereka kategorikan sebagai e-ekspresif. Meskipun tidak meneliti media sosial secara langsung, kedua penelitian ini meningkatkan harapan bahwa karena fitur-fitur yang kini dapat dianggap sebagai bagian integral dari arsitektur platform media sosial, beberapa penggunaan media sosial dalam politik tidak boleh diklasifikasikan ke dalam salah satu dari penggunaan media sosial. kategori partisipasi kanonik karena mereka mungkin mewakili faktor partisipasi yang diperluas. Tapi seperti apa struktur yang diperluas ini dan bagaimana kita bisa berteori? Hal ini merupakan sebuah teka-teki yang menarik, terutama mengingat potensi platform media sosial untuk memfasilitasi bentuk-bentuk partisipasi yang ada dan menghasilkan tindakan-tindakan politik baru yang tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya platform-platform tersebut.

Cara yang menjanjikan untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui rubrik keterjangkauan. Keterjangkauan teknologi adalah tindakan dan penggunaan teknologi yang secara kualitatif lebih mudah atau mungkin dilakukan jika dibandingkan dengan teknologi serupa sebelumnya (Hoffmann & Lutz, 2021). Keterjangkauan telah dipertimbangkan pada tingkat individu, perilaku, dan organisasi politik (Tai et al., 2020). Keterjangkauan media sosial secara luas dianggap memfasilitasi interaktivitas (Choi & Song, 2020) dan mempromosikan Politik Eropa Barat Twitter dirancang sedemikian rupa untuk memfasilitasi pembentukan dan pemeliharaan jaringan berdasarkan kepentingan bersama atau ikatan tipis, tanpa memerlukan persetujuan bersama untuk menjalin hubungan antar manusia. Sebaliknya, Facebook dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dalam jaringan di mana ikatan yang kuat relatif lebih penting, dan terdapat dasar yang lebih kuat dalam hubungan offline (Gil de Zúñiga et al., 2021). Kedua platform tersebut menunjukkan perbedaan dalam cara mereka memungkinkan keterlibatan dan ekspresi politik serta apa konsekuensinya (Gorwa, 2019). Sebaliknya, persyaratan Facebook yang mengharuskan kedua orang menerima pertemanan sebelum mereka terhubung memungkinkan adanya struktur jaringan yang berbeda untuk konsumsi berita dan dinamika percakapan.

Karya ilmiah yang signifikan telah dikhususkan untuk menggambarkan bagaimana arsitektur platform dapat menyebabkan perbedaan perilaku. Di sini, pertama-tama kami merangkum kemampuan utama Twitter dan Facebook (dua platform media sosial politik paling

populer) yang relevan bagi partisipasi politik, dan membuat teori bagaimana hal-hal tersebut dapat berdampak pada repertoar partisipasi. Meskipun daftar lengkap mengenai keterjangkauan media sosial akan panjang, dapat menimbulkan perdebatan, dan rentan menjadi ketinggalan jaman dengan cepat, penelitian yang ada saat ini menekankan bahwa banyak platform media sosial memiliki keterjangkauan tingkat atas tertentu yang relevan dengan politik (Rahman et al., 2022). Hal ini mencakup visibilitas publik atas pemikiran atau tindakan masyarakat, anonimitas serta identifikasi, ketekunan, dan otomatisasi (Borbáth, 2021). Keterjangkauan bersama antar platform adalah sumber kesamaan konsekuensi sosial dan politik dari penggunaan media sosial secara umum. Namun perbedaan dalam hal keterjangkauan platform setidaknya sama pentingnya dengan persamaan.

Di Twitter, keputusan berikut bersifat sepihak dan jaringan dapat diperluas hingga ukuran yang sangat besar (Gil de Zúñiga et al., 2021). Pengguna Twitter juga banyak berinvestasi dalam berita dan peristiwa terkini dan hampir setengahnya melaporkan bahwa jaringan mereka lebih berorientasi pada tokoh masyarakat dan pengguna lain yang mereka sendiri tidak kenal (dibandingkan dengan hanya 3 persen di Facebook) Twitter mendorong masyarakat untuk membangun (misalnya ikatan yang kuat vs. lemah, formal vs. informal), yang berarti bahwa pertimbangan yang sangat berbeda mungkin berperan ketika seseorang memutuskan untuk bertindak (Arshad & Khurram, 2020). Artinya, komposisi publik Twitter mungkin menjadi alasan yang cukup bagi sebagian orang untuk menggunakan platform tersebut guna memenuhi kebutuhan komunitas, sosial, atau politik. Selain itu, meskipun mengikuti elit politik atau berbagi komentar tentang politik yang merujuk pada aktor tertentu dapat dilakukan di kedua platform, arsitektur asimetris Twitter dan audiens berbeda yang dimiliki Facebook sejauh mana menjembatani dan mengikat modal sosial (Borbáth, 2021) dan sejauh mana perbedaan gender dalam komunikasi politik (Jungherr et al., 2019). Dibandingkan dengan Facebook, pengguna Twitter lebih banyak melakukan postingan politik, lebih sering terpapar konten politik yang bersifat kontra-sikap, dan kecil kemungkinannya menerima pesan mobilisasi atau iklan politik. Sejauh mana perbedaan dan persamaan ini menghasilkan tindakan partisipatif baru atau sekadar memfasilitasi tindakan partisipatif yang sudah ada merupakan pertanyaan empiris yang akan kami teorikan selanjutnya.

## **Pembahasan**

### ***Citizen Reporter Sebagai Sebagai Alternatif Jurnalistik Bagi Warga***

Menghubungkan media/jurnalisme alternatif dengan jurnalisme warga bukanlah hal yang aneh, namun mendefinisikan jurnalisme warga menghadirkan berbagai tantangan. Definisi-definisinya sangat tidak jelas, sebagian besar disebabkan oleh adanya persaingan dalam menerjemahkan apa yang dimaksud, apa yang diklaimnya, dan apa yang seharusnya. Dan, seperti jurnalisme alternatif, jurnalisme warga menegaskan perbedaannya dengan mengklaim memulihkan arsip pengetahuan yang tertindas, meningkatkan akses dan partisipasi, dan mengganggu norma dan hierarki yang menjadi ciri produksi dan penyebaran berita arus utama.

Definisi kerja telah diberikan oleh para sarjana menggambarkan jurnalis warga sebagai orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai penonton, sementara (Arshad & Khurram, 2020; Yoga Sembada & Sadjjo, 2020) menyebut mereka prosumer. Namun definisi-definisi ini dirasa kurang, karena definisi-definisi tersebut lebih berfokus pada pihak-pihak yang menghasilkan jurnalisme dibandingkan jurnalisme itu sendiri (Septiani, 2019; Susanto & Irwansyah, 2021). Definisi yang tepat menjadi semakin rumit karena dampak teknologi media baru terhadap jurnalisme dan praktiknya, sehingga memungkinkan apa yang disebut oleh (Hoffmann & Lutz, 2021; Lukman Ismail et al., 2024) sebagai desentralisasi dan penyusunan ulang berita. Di dalam dan di luar organisasi berita, teknologi ini telah secara radikal menghilangkan hierarki penjaga gerbang dan menciptakan hubungan yang lebih horizontal dan non-linier antara produsen berita dan konsumen. Hal ini penting karena hierarki yang terkait dengan media arus utama cenderung melembagakan berbagai bentuk eksklusif. Ketergantungan pada nilai-nilai berita menunjukkan bagaimana media arus utama mengecualikan suara dan ruang biasa yang lebih lemah. Biasanya dengan latar belakang inilah jurnalisme warga dipandang oleh sebagian orang sebagai perbaikan terhadap bentuk-bentuk eksklusif yang sudah dilembagakan.

Namun, ada pakar yang berpendapat bahwa kita perlu fokus tidak hanya pada jurnalisme dalam jurnalisme warga, namun lebih mendasar lagi pada kewarganegaraan. Mengembangkan kerangka kerja yang memandang jurnalisme warga sebagai alat kewarganegaraan dan jurnalisme warga sebagai bentuk kewarganegaraan tersendiri. Baik sebagai alat maupun bentuk kewarganegaraan, (Rahman et al., 2022) dalam kaitannya dengan Zimbabwe, menunjukkan

bagaimana teknologi komunikasi baru dipandang oleh banyak orang berpotensi memulihkan elemen penting kewarganegaraan, yaitu kemampuan berkomunikasi atau mengekspresikan diri. tanpa kendala politik atau kelembagaan formal (Riska Septa Yuliandri, 2024).

Bisa dibilang, Internet dan teknologi media baru lainnya kini menawarkan banyak sekali kemungkinan komunikatif, sehingga memungkinkan penerapan berbagai kebebasan yang ditolak oleh media arus utama secara hukum dan/atau politik. Karena kemungkinan-kemungkinan komunikatif inilah jurnalisme warga akhir-akhir ini cenderung berbasis Internet. Platform online masih relatif tidak terkendali. Bagi jurnalis warga, hal ini memberikan kebebasan yang lebih besar untuk berekspresi, memungkinkan keterlibatan yang lebih luas dengan warga yang tercabut haknya, serta kemudahan berjejaring melintasi batas-batas ruang dan waktu, menghilangkan ruang dan pada saat yang sama mengikis hierarki penjaga gerbang tertentu dalam membuat pemberitaan.

### **Citizen Reporter Sebagai Ruang Diskursif Alternatif**

Indonesia bisa dibilang merupakan salah satu komunitas online paling aktif di benua ini. Sebagian besar aktivitas ini terjadi di Twitter (Borbáth, 2021). Warga Indonesia di Twitter sangat aktif dalam perbincangan seputar akuntabilitas sosial, ekonomi, dan politik di negara tersebut. Kebanyakan pembicaraan seperti ini sering kali terlalu kontroversial untuk diliput oleh media arus utama. Meskipun partisipasi terbuka untuk semua orang, sebagian besar tidak dimoderasi dan pada prinsipnya tidak bersifat hierarkis, komunitas online ini telah menciptakan hierarkinya sendiri. Sebagian besar perbincangan di KOT umumnya diprakarsai dan/atau dipopulerkan oleh beberapa blogger dan aktivis terkenal. Di antara mereka, mereka memiliki jutaan pengikut tidak hanya di Twitter tetapi juga di situs media sosial lainnya seperti Google+, Instagram, Facebook, dan blog masing-masing. Tampaknya dampaknya terhadap percakapan nasional – tidak hanya secara online tetapi juga offline – sangatlah signifikan. Sebagian besar berita yang mereka rintis atau diskusikan, khususnya di Twitter, cenderung menjadi tren dan akhirnya dimuat di surat kabar nasional, serta stasiun TV dan radio.

Platform online sebagai ruang penting untuk keterlibatan sosial dan politik di Indonesia merupakan subjek yang menarik perhatian ilmiah secara signifikan misalnya, menawarkan diskusi yang berguna tentang peran media sosial selama krisis pasca pemilu di Indonesia (Dwitama et al., 2022; Lukman et al., 2024; Riska Septa Yuliandri, 2024; Srikandi et al., 2023). Ketika negara membatasi kebebasan berekspresi di media arus utama, banyak warga Indonesia bermigrasi ke dunia maya untuk melakukan percakapan yang lebih intim – baik yang bersifat jelek, subversif, atau kontroversial (Errika Dwi Setya Watie, 2011), yang mempelajari platform online yang lebih kecil dan jurnalis warga di Indonesia dan Afrika Selatan, berpendapat secara lebih umum bahwa platform online memfasilitasi penciptaan ruang alternatif untuk pertimbangan publik yang jauh lebih mewakili kepentingan publik, dan memungkinkan inklusi populer dalam diskusi. Yang penting, beberapa orang tersebut memakai banyak topi, dan menggambarkan diri mereka sebagai aktivis, komentator sosial dan politik, jurnalis warga, atau sekadar blogger. Namun, saya ingin menjadikan para praktisi ini sebagai contoh munculnya kelompok jurnalis warga/alternatif ini dan menunjukkan bagaimana, melalui penggunaan Twitter, kita melihat media sosial bertindak sebagai ruang diskursif yang penting untuk mempertimbangkan penyajian berita alternatif.

Meskipun para pakar seperti (Dimitrova et al., 2014) telah mengemukakan kekhawatiran mengenai narasi tekno-deterministik yang secara rutin membahas beberapa teknologi baru (sebuah pandangan yang valid), penting untuk dicatat bahwa teknologi-teknologi tersebut kritik terkadang mengabaikan sifat keterlibatan sosial dan politik yang dimungkinkan oleh teknologi ini, misalnya, komunitas mendiskusikan hal-hal yang biasa dan penting secara politik, sehingga menimbulkan tindakan dan ketiadaan tindakan. Namun yang pertama harus dipahami memiliki arti beberapa hal, pada berbagai tingkatan. Keterlibatan dapat terjadi pada tingkat kesadaran, yang mungkin merupakan langkah pertama menuju tindakan yang lebih praktis. Memang benar, kemampuan berkomunikasi secara relatif bebas merupakan tindakan kewarganegaraan dan menikmati hak kewarganegaraan. Oleh karena itu, secara individu dan kolektif, dapat dikatakan bahwa melalui Twitter telah muncul ruang ketiga di mana kita melihat penyampaian berita dan informasi alternatif, yang seringkali mengandalkan sumber-sumber non-tradisional dan memungkinkan percakapan yang lebih inklusif mengenai isu-isu penting nasional.

## D. Kesimpulan

Peran citizen reporter dalam konteks media sosial menunjukkan dinamika baru dalam partisipasi publik yang relevan dengan prinsip-prinsip administrasi publik partisipatif. Media sosial bukan lagi sekadar sarana komunikasi interpersonal, tetapi telah menjadi ruang publik digital tempat masyarakat mencari informasi, berdiskusi, membentuk jaringan, dan mengartikulasikan kepentingan politik secara langsung. Melalui media sosial, warga negara memiliki kesempatan untuk memproduksi dan menyebarkan informasi secara mandiri tanpa bergantung pada media arus utama, sehingga dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan dalam proses tata kelola publik.

Dalam konteks ini, citizen reporter berperan sebagai aktor kunci yang menjembatani kesenjangan antara negara dan warga. Mereka tidak hanya menghadirkan narasi alternatif atas isu-isu publik, tetapi juga memperluas akses bagi kelompok yang selama ini termarginalisasi. Kendati demikian, tantangan seperti bias informasi, stereotip, polarisasi politik, serta ketimpangan akses terhadap teknologi masih perlu diatasi agar peran citizen reporter dapat berkontribusi secara optimal terhadap demokratisasi ruang publik.

Fenomena meningkatnya partisipasi horizontal melalui media sosial juga mencerminkan pelembagaan ruang digital sebagai sarana ekspresi politik yang inklusif. Warga kini dapat menyuarakan pandangannya secara langsung kepada pemangku kebijakan, bahkan melalui cara-cara kreatif seperti penggunaan humor politis, tanpa rasa takut akan pembalasan. Hal ini menunjukkan pergeseran mendasar dalam pola komunikasi politik dan pembentukan opini publik. Dengan demikian, peran citizen reporter melalui media sosial tidak hanya menjadi bentuk jurnalisme alternatif, tetapi juga merupakan manifestasi dari partisipasi warga yang aktif dalam administrasi publik. Di tengah terbatasnya ruang di media arus utama, media sosial menyediakan arena baru bagi artikulasi kepentingan, pengawasan publik, dan pelembagaan demokrasi yang lebih partisipatif di Indonesia.

## E. Referensi

- Arshad, S., & Khurram, S. (2020). Can government's presence on social media stimulate citizens' online political participation? Investigating the influence of transparency, trust, and responsiveness. *Government Information Quarterly*, 37(3), 101486. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101486>
- Borbáth, E. (2021). Two faces of party system stability: Programmatic change and party replacement. *Party Politics*, 27(5), 996–1008. <https://doi.org/10.1177/1354068820917628>
- Chayinska, M., Miranda, D., & González, R. (2021). A longitudinal study of the bidirectional causal relationships between online political participation and offline collective action. *Computers in Human Behavior*, 121(March). <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106810>
- Choi, J. C., & Song, C. (2020). Factors explaining why some citizens engage in E-participation, while others do not. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101524. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101524>
- Dimitrova, D. V., Shehata, A., Strömbäck, J., & Nord, L. W. (2014). The Effects of Digital Media on Political Knowledge and Participation in Election Campaigns: Evidence From Panel Data. *Communication Research*, 41(1), 95–118. <https://doi.org/10.1177/0093650211426004>
- Dwitama, M. I., Hakiki, F. A., Sulastri, E., Usni, U., & Gunanto, D. (2022). Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(1), 53. <https://doi.org/10.24853/independen.3.1.53-66>
- Errika Dwi Setya Watie, . (2011). Komunikasi dan media sosial ( communications and social media ). *The Messenger*, 3(1), 69–75. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>
- Gil de Zúñiga, H., Ardèvol-Abreu, A., & Casero-Ripollés, A. (2021). WhatsApp political discussion, conventional participation and activism: exploring direct, indirect and generational effects. *Information Communication and Society*, 24(2), 201–218. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1642933>
- Gorwa, R. (2019). What is platform governance? *Information Communication and Society*, 22(6), 854–871. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1573914>
- Hoffmann, C. P., & Lutz, C. (2021). Digital Divides in Political Participation: The Mediating Role of Social Media Self-Efficacy and Privacy Concerns. *Policy and Internet*, 13(1), 6–29. <https://doi.org/10.1002/poi3.225>

- Jungherr, A., Posegga, O., & An, J. (2019). Discursive Power in Contemporary Media Systems: A Comparative Framework. *International Journal of Press/Politics*, 24(4), 404–425. <https://doi.org/10.1177/1940161219841543>
- Lukman Ismail, Egi Regita, Jusfira Yuniar, Devia Ananda Umar, Muh. Ali fikri Subair, & Agung Indra Wijaya. (2024). Pertarungan Ideologi: Konflik Politik Dalam Dinamika Masyarakat Modern. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 55–63. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i1.194>
- Lukman, N. A., Siregar, H., & Nainggolan, C. (2024). Peran Media Sosial Terhadap Pembentukan Persepsi Gen Z dalam Pemilihan Presiden 2024. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(3), 753–761.
- Rahman, A., Latifah, E. D., & Fachrurrazi, S. (2022). Peranan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 6(1), 12. <https://doi.org/10.29103/sisfo.v6i1.7961>
- Riska Septa Yuliandri, S. T. M. (2024). PERAN MEDIA MASSA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(11).
- Septiani, P. E. (2019). Peran Media Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Konteks Politik. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 105–111.
- Srikandi, M. B., Suparna, P., & Haes, P. E. (2023). Audiens Sebagai Gatekeeper Pada Media Sosial. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 7(2), 179. <https://doi.org/10.24853/pk.7.2.179-192>
- Susanto, R. D., & Irwansyah. (2021). Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 65–77. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>
- Tai, K. T., Porumbescu, G., & Shon, J. (2020). Can e-participation stimulate offline citizen participation: an empirical test with practical implications. *Public Management Review*, 22(2), 278–296. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1584233>
- Yoga Sembada, W., & Sadjijo, P. (2020). Strategi Pesan Aktor Politik Dalam Media Sosial (Studi Kasus Akun Wali Kota Tangerang Selatan Banten). *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan*, 2(1), 48–65. <https://doi.org/10.31599/komaskam.v2i1.3207>